

KONTRIBUSI GEREJA DALAM DUNIA POLITIK

Lotnatigor Sihombing

Pendahuluan

Salah satu sendi kehidupan yang acapkali dihindari oleh orang Kristen secara individual atau gereja secara institusional adalah masalah politik. Padahal masalah politik adalah masalah yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ketika kita berbicara tentang "Kontribusi Gereja Dalam Dunia Politik", kita diajak berbicara tentang politik secara proporsional, dalam kacamata iman Kristen. Dengan kata lain, kita diajak untuk "Memandang Dunia Politik" dalam pendidikan Etika Politik, yang jelas berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban politik, sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai warga Kerajaan Allah.

Bagi sebagian warga gereja, istilah politik seringkali menjadi "momok" karena konotasi dan asumsi bahwa politik itu kotor, arogan, penuh dengan intrik, kelicikan dan duniawi. Hal itu terjadi karena yang dibicarakan adalah politik praktis, yang lebih didominasi oleh praktik-praktik atau metodologis teknis, yang memberikan kesan kotor; yang berpolakan "tujuan menghalalkan cara", "Ujung-ujungnya Duit" dan seterusnya.

Dalam wacana kali ini, bukan dalam rangka mendirikan "Partai STT AMANAT AGUNG", namun memfokuskan politik, kewarganegaraan dalam konteks keselamatan teologis. Bagaimana keikutsertaan orang Kristen dalam masalah politik sebagai dimensi **tanggung jawab**? Apalagi dalam konteks seperti sekarang ini, politik sedang menjadi

agenda utama masyarakat serta banyaknya orang “ngompol” (ngomong politik).

Dengan kebebasan pasca lengsernya Presiden Soeharto selama 8 (delapan) tahun ini, hampir-hampir tidak ada acuan baku untuk membicarakan masalah politis. Apa yang dibicarakan kemarin barangkali tidak lagi relevan untuk hari ini. Namun apakah itu berarti kita cukup “melihat” dan “menunggu” saja? Justru konteks yang sedang tersaji di hadapan kita ini perlu juga dicermati dengan asumsi-asumsi dasar.

Dengan demikian kita sedang mencoba menjawab pertanyaan, adakah dasar-dasar Alkitabiah bagi orang Kristen dalam kiprahnya sebagai warga negara yang bertanggung jawab? Pada satu sisi orang Kristen adalah “Warga Negara Republik Indonesia” dan di sisi lain sebagai “Warga Negara Kerajaan Surga”.

Pengertian Istilah

Untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan atau politik, kita harus membatasi arti istilah. Dalam pengertian umum, politik dikaitkan dengan segala urusan dan tindakan pemerintahan dan kenegaraan. Secara negatif acapkali politik disejajarkan dengan pengertian tipu muslihat, taktik karena dilatarbelakangi oleh filsafat, seperti paham Machiavelli, Marxisme, Utilisme, dll.

Politik berasal dari kata *polis*, *politeia*. Dalam Perjanjian Baru istilah *polis* (kota) mempunyai arti yang cukup kompleks. Misalnya kota (Mat. 2:23, Mrk. 1:45, Luk. 4:29, Yoh. 11:54, Kis. 5:16), yang pada dasarnya menunjuk kepada Yerusalem baru atau Yerusalem surgawi, suatu pemukiman yang melimpah dengan berkat (Ibr. 11:10), seperti yang disaksikan Yohanes dalam pentas apokaliptis, saat terjadi penciptaan bumi dan langit baru (Why. 3:12; 21:14).

Selain istilah *polis*, ada juga *politeia* yang berarti pemerintahan sipil, negara, tetapi dapat juga diartikan sebagai kewarganegaraan. Contohnya Paulus yang memiliki kewarganegaraan Romawi (Kis. 22:25-29).

Arti suatu istilah bisa bergeser atau berkembang dari makna yang mula-mula, sesuai dengan dinamika zaman. Demikian juga pada zaman ini, bisa saja politik mempunyai muatan atau konotasi yang kompleks sesuai dengan konteks. Namun, pada dasarnya kita harus membatasi pengertian istilah politik dalam hubungan dengan negara, pemerintahan dan rakyat atau warga negara. Orang Kristen di Indonesia adalah warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya institusi yang bernama STT AMANAT AGUNG.

Dalam Kisah Para Rasul 17:26, disebutkan "*dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka*". Namun dalam kerajaan Allah, kebangsaan (etnis) tidak membatasi kewargaan surga (Flp. 3:20). Karena itu "*kesukaan untuk seluruh bangsa*" di dalam Lukas 2:10, bukan "bangsa" dalam pengertian "*etne*" atau etnis, namun istilah yang dipakai adalah "*laos*" atau umat.

Sebagai warga negara tidak seorang pun dapat menghindarkan diri dari eksistensi warga negara. Seorang warga negara terikat dalam hukum, peraturan-peraturan, konstitusi politik yang menjamin hak-hak kewarganegaraan, tetapi juga mempunyai kewajiban atau tanggung jawab sebagai warga negara. Demikian juga kita sebagai orang "Kristen Indonesia" dan "Indonesia Kristen" mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga yang lain. Dalam konstelasi kenegaraan, hak dan kewajiban tidak mengacu kepada "mayoritas" dan "minoritas". Kesadaran nasional Indonesia sebagai bangsa (*nation*) tidak berazaskan pada proporsi mayoritas dan minoritas sejak "Kebangkitan Nasional" 20 Mei 1908, "Sumpah Pemuda" 28 Oktober 1928 dan "Proklamasi" 17 Agustus 1945.

Fakta-fakta Alkitabiah Yang Berkaitan Dengan Kenegaraan

1. Allah sumber otoritas

Mazmur 72 menunjukkan tentang pelantikan seorang raja. Salomo mengakui bahwa otoritas Allah sebagai sumber hukum, sumber otoritas,

sumber keadilan (*theodicy* = keadilan Allah) dan semua raja harus tunduk kepada Allah (ay. 11). Mazmur ini bukan refleksi mitologis melainkan teologis atau teokratis. Bangsa Israel tetap meyakini bahwa Allah adalah sumber otoritas, sehingga politik pemerintahan tidak boleh terlepas dari hukum Allah (Taurat).

Kendatipun Indonesia bukan negara teokratis, namun dalam pengakuan secara konstitusional ada refleksi teokratis, dengan rumusan Pancasila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kendati pun Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila bukanlah rumusan teologis melainkan rumusan politis. Pada sisi lain apa pun sistem pemerintahan suatu negara tetap mempunyai tanggung jawab "teokratis", sebab para penguasa harus mempertanggungjawabkan segala kekuasaan tersebut kepada Allah Yang Maha Kuasa.

2. Sikap Tuhan Yesus

Pertama-tama kita harus menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengubah dan membatalkan Taurat (bdk. Mat. 5:17).

Sikap terhadap pembayaran pajak dan pemerintah Romawi juga jelas (bdk. Mat. 22:15-22). Sehubungan dengan hal membayar pajak, Tuhan Yesus pernah dijebak oleh orang Farisi dengan menggunakan orang-orang Herodian (ay. 16). Partai Herodian adalah partai yang anti pemerintahan Romawi (kaum oposan). Jika Yesus menunjukkan sikap pro kepada kaum Herodian, dengan menjawab "tidak"; maka Ia akan dicap sebagai *agitator* yang anti pemerintah berkuasa, dalam hal ini adalah pemerintah Romawi, sedangkan jika Ia menjawab "ya"; Ia akan dicap sebagai *antipatriotik*. Namun "jebakan politis" yang tidak mengena itu, dipakai Tuhan Yesus untuk menunjukkan bagaimana sikap-Nya secara etika politis yang konkret (ay. 21).

Di dalam Yohanes 19, Tuhan Yesus diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah Romawi yang diwakili oleh Pontius Pilatus. Pilatus yang bersikap *altruis* (lawan kata *egois*, meskipun sebenarnya akar *altruis* juga *egois*), asal orang lain (orang banyak) senang dan Asal Badan Selamat. Sebagaimana biasa ada ABS yang *altruis* (Asal Bapak Senang) dan ABS *egois* (Asal Badan Selamat) Yesus dengan tegas menunjukkan sumber kekuasaan (Yoh. 19:11). Yesus mengarahkan Pontius Pilatus untuk

mengerti bahwa sumber sistem politis tidak boleh lepas dari Kerajaan Allah. Dengan kata lain, Kerajaan politis harus mengalami karya penebusan Kristus (bdk. Kol. 1:20).

3. Sikap Para Rasul

Dalam hal ini Paulus dilihat sebagai representasi para rasul, di samping Petrus yang juga menyinggung masalah kewarganegaraan dan hal-hal yang berkaitan dengan "*politeia*". Dalam Roma 13 dijelaskan tentang sikap terhadap penguasa pemerintahan, namun harus diinterpretasi dalam konteks surat Roma secara utuh. Roma 12 maupun 13 diuraikan oleh Paulus sesudah pasal 1-11. Injil telah membebaskan warga Romawi dari kegelapan, menjadi milik Allah dalam wujud nyata jemaat Roma.

Jemaat Roma setelah mengalami kebenaran Injil Yesus Kristus, mempunyai kecenderungan meninggalkan pemerintah beserta politiknya. Orang Kristen mulai menarik diri. Sikap mereka bersifat antagonis dan *rejective*. Namun, Paulus tidak menghendaki jemaat ini terseret ke ekstrem yang anarkis, melainkan supaya mereka taat kepada pemerintah, sesuai dengan pengertian bahwa pemerintah menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Allah. Tentu saja, pemerintah juga harus mempertanggungjawabkannya kepada "Pemberi Kekuasaan" yaitu Allah sendiri (ay. 1). Allah memberi wewenang bukan untuk sewenang-wenang. Allah memberi otoritas bukan supaya otoriter.

Jika orang Kristen tidak taat kepada pemerintah dan tidak berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab maka citra orang Kristen akan rusak. Orang Kristen harus mengakui lembaga pemerintah yang diadakan karena kehendak Allah (ay. 1).

Panggilan tersebut tentu saja menuntut peran aktif, yang harus dimulai dari pasal 12, yaitu penyerahan diri kepada Allah (Rm. 12:1 - 2), sehingga tidak menjadi serupa dengan dunia. Dengan demikian, pemerintah dapat berperan sebagai hamba Allah (Rm. 13:4).

Justru di sinilah tugas dan tanggung jawab gereja (dalam pengertian umat Allah, bukan organisasi Gereja) supaya memampukan pemerintah menjadi hamba Allah. Ini hanya dapat terjadi apabila orang Kristen memenuhi panggilannya. Doa syafaat bagi pemerintah merupakan bagian

aktivitas orang Kristen sebagai warga negara (bdk. 1Tim. 2:1-4) dan sikap tunduk kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya (bdk. 1Ptr. 2:13, 14).

4. Tokoh-tokoh Alkitab

Alkitab tidak sedikit mengemukakan tokoh yang mempunyai peran sangat penting dalam kenegaraan. Adalah tidak mungkin dalam kesempatan ini kita berbicara panjang lebar tentang tokoh-tokoh Alkitab tersebut, namun dapat disebut misalnya, Yusuf (Kej. 41-50), dalam pemerintahan kafir di Mesir. Daniel yang berperan aktif dalam tiga orde pemerintahan, Babel, Media dan Persia, juga sejumlah tokoh lain seperti Nehemia, Ester dan lain-lain.

Bagaimana dengan Indonesia selama ini dan dewasa ini khususnya dalam era reformasi dan kondisi yang sarat dengan krisis ini? Apa partisipasi konkret dan kontribusi kita sebagai warga negara?¹

Kehidupan Antar Umat Beragama

Salah satu fakta sosial di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah kehidupan antar umat beragama. Masalah SARA (Suku, Agama, Ras Antar golongan) adalah fakta sosial yang secara sadar harus dihadapi. Kemajemukan bangsa Indonesia selain multi etnik, tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran dan perkembangan agama-agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan akhir-akhir ini meskipun masih dengan malu-malu mengakui Konghucu.

Agama secara umum mempunyai arti yang potensial dan posisi yang amat penting, bahkan fungsi yang ikut menentukan perjalanan "*nation building*", karena agama secara sosiologis merupakan:

1. Faktor **motivatif**: agama memberikan motivasi, dorongan semangat akhlak dan moral yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan manusia, termasuk pembangunan bangsa.
2. Faktor **kreatif dan inovatif**: memberikan dorongan, semangat untuk bekerja kreatif dan produktif dengan penuh dedikasi; juga

¹Perhatikan Lotnatigor Sihombing, *Etika Politika*, (ceramah kepada pemuda/mahasiswa GKI Nurdin, Jakarta, 1999).

mendorong manusia untuk menemukan dan memperbaharui serta menyempurnakan yang telah dimiliki.

3. Faktor **integratif**: agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial.
4. Faktor **sublimatif**: agama merupakan bagian pelaksanaan ibadah dari insan (ciptaan) terhadap Allah (pencipta).
5. Faktor **sumber inspirasi**: yang secara konkret terwujud dalam kebudayaan materi (madi) maupun non materi, seperti: kesopanan, penghiburan, sastra, dll.²

Memperhatikan potensi agama dalam kehidupan sosial, yang sedemikian rupa, maka sejak awal berdirinya Republik ini, keragaman agama mendapat perhatian ekstra dari semua pihak, baik secara positif konstruktif maupun secara negatif destruktif, dengan memeralat agama untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah tidak dapat mengesampingkan kehadiran agama-agama di Indonesia, yang mempunyai muatan "prasangka", "konflik", "ketegangan" antar umat beragama maupun intern penganut agama-agama tersebut.

Agama secara umum (ideal konsepsional) mempunyai aspirasi damai, namun secara faktual dalam kehidupan masyarakat terjadi konflik atau ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan. Dalam "perbedaan" ini muncul apa yang disebut "*superioritas religius*" atau "kesombongan religius."³

Superioritas agama jika dilihat dengan kacamata **Sosiologi Agama** dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- => Agama A (paling benar dan paling lengkap): Saya/Kami/Kita
- => Agama B (ada unsur kebenaran, tak lengkap): Engkau/Kamu
- => Agama C (sedikit kebenaran, amat tak lengkap): Dia/Mereka
- => Agama D (tidak mempunyai kebenaran/ kafir): Dia/Mereka

²Bdk. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, Th. Anggaran 1982/1983), 1-3.

³Bdk. D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Jakarta, Yogyakarta: BPK Gunung Mulia dan Yayasan Kanisius, 1983), 155.

Penilaian semacam ini meskipun pada umumnya ada di alam pikiran, namun tak jarang terungkap dalam kata-kata (lisan maupun tulisan) dan dalam perilaku. Mudah diterka bahwa pernyataan di atas tidak bebas dari salah paham, praduga, konflik dan ketegangan emosional.⁴

Konflik antar umat beragama adalah fakta sejarah yang tidak hanya dimonopoli masyarakat Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang menimbulkan konflik tersebut perlu diperhatikan permasalahannya - meskipun tidak harus dipermasalahkan.

1. Doktrin dan sikap mental umat penganut agama

Harus diakui bahwa pada umumnya agama mengajarkan pengajaran yang baik (moral, persaudaraan, kasih, dan lain-lain). Namun tanpa mempermasalahkannya, masing-masing penganut agama berkeyakinan bahwa agamanyalah yang paling benar. Sikap ini berdampak lanjut dalam sikap dan tingkah laku sehingga terjadilah konflik, fanatisme, dan lain-lain.

2. Latar belakang etnis (ras, bangsa, suku)

Sudah dikemukakan bahwa agama mempunyai sumbangan positif, sebagai faktor integratif, yang memungkinkan terintegrasinya manusia yang berlatar belakang etnis berbeda. Hal positif ini memang bukan masalah. Namun, yang perlu dipertanyakan apakah perbedaan latar belakang etnis (ras, bangsa, suku) itu ditambah dengan perbedaan agama tidak menjadi penyebab lebih kuatnya perpecahan antar sesama? Apalagi jika ditambah dengan konflik-konflik dan prasangka-prasangka rasial dan sosial?

Bukankah latar belakang etnis juga merupakan masalah yang sensitif dalam masyarakat Indonesia? SARA (meskipun para petinggi negara hampir selalu beragumentasi bukan karena SARA

⁴Tahun 1986 (19 tahun yang lalu) ketika penulis mempresentasikan makalah dalam rangka Penataran P-4, hal ini secara terus terang penyaji ungkapkan di depan Penatar dan Petatar. Dan ternyata tahun-tahun selanjutnya konflik-konflik yang terjadi di Surabaya, Situbondo, Tasikmalaya, Ketapang, Ambon, Doulos, dan lain-lain bernuansa SARA.

yang menjadi sebab meledaknya konflik-konflik horizontal) jelas merupakan penghambat kesatuan nasional yang perlu ditangani secara intensif. Bagaimana dengan sekarang ini? Jangan sampai justru SARA ini menjadi senjata ampuh bagi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu asalkan tujuan tercapai. Dengan perkataan lain SARA menjadi komoditas politik.

3. Perbedaan Tingkat Kebudayaan

Perbedaan ini lebih bersifat universal, bukan secara khusus yang bersifat nasional atau provinsial; namun mempunyai dampak konkret dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara ringkas (kendati bisa didiskusikan dan diperdebatkan secara panjang lebar), "survei membuktikan" bahwa ada kemajuan budaya pelbagai pendukung kebudayaan yang berbeda. Ada yang maju dan ada yang kurang, dengan pengertian asumsi umum. Akumulasi Ilmu Pengetahuan positif dan teknologi di satu sisi dan hasil pembangunan fisik di sisi lain, dengan peran agama dalam kemajuan itu.

Dari asumsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya ketegangan antara bangsa yang berbudaya "tinggi" dan yang berbudaya "rendah" dari dulu hingga sekarang, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab agama yang dianut oleh bangsa-bangsa tersebut.

Apa hubungannya dengan konteks Indonesia?

Sejarah pergolakan kolonialisme, mencatat bahwa bangsa-bangsa yang berkebudayaan "tinggi", "kuat" (dalam arti luas) yang menganut agama Kristen lebih kurang 4 (empat) abad menjajah bangsa-bangsa di luar Eropa, seperti bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Latar belakang ini juga merupakan fakta penyebab konflik, prasangka antar umat beragama di Indonesia.⁵

⁵Isu yang pernah berkembang sebagai argumentasi mengapa anggaran untuk Agama Kristen di zaman Orde Baru begitu sedikit, sedangkan untuk Agama Islam cq Departemen Agama RI lebih banyak, karena pada zaman pemerintah Hindia Belanda perbandingan bantuan kepada rumah-rumah ibadah Kristen (Gereja) sebanyak 1.000.000 gulden sedangkan untuk mesjid hanya

4. Masalah Mayoritas dan Minoritas

Hubungan kedua golongan ini seringkali digambarkan dengan pernyataan (secara universal) "diktator mayoritas dan teror minoritas". Secara kuantitas, mayoritas-minoritas adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun tidak menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Di dalam masyarakat yang majemuk seperti ini dapat muncul konflik yang disebabkan oleh masalah mayoritas-minoritas.

Dampak hubungan mayoritas-minoritas pada tingkat internasional kurang terasa dibandingkan dengan tingkat nasional, atau lingkup yang lebih kecil lagi. Hal ini mudah dipahami karena kepentingan yang berbeda pada tempat dan saat yang sama, mudah menimbulkan benturan dan salah paham antara golongan.

Referensi Historis

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini lahir dan berkembang dalam suatu proses sejarah yang panjang. Untaian mutiara sejarah sambung-menyambung semakin lama semakin nyata. Dari awal kehadiran suku-suku dan agama-agama di bumi persada, kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara, datangnya penjajah silih-berganti dan bersama-sama, jiwa bangsa telah ditempa dan dibentuk untuk kemudian lahir sebagai bangsa Indonesia.

Sejarah yang benar juga menjadi referensi dan pendorong semangat untuk melanjutkan perjuangan memasuki masa depan dengan keyakinan dan pengharapan; agar generasi sekarang dan generasi selanjutnya dapat bahu-membahu melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, partisipasi kita dalam menegakkan "supremasi hukum" (penulis lebih cenderung kepada **supremasi keadilan**), menuntaskan masalah salah urus negara selama 32 (tigapuluh dua tahun) dan agenda perbaikan ekonomi, bentuknya sesuai dengan porsi kita masing-masing.

5.000 gulden. Sedangkan Muller Gruger mencatat bahwa pada tahun 1927 diusulkan bahwa bantuan untuk Gereja Protestan 31.000.000 gulden, Roma Katolik 10.080.000 gulden dan Islam 80.000 gulden. Dikutip dari Muller Gruger, *Sejarah Gereja Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1966), 72.

Bagi kita, Indonesia adalah sebuah wujud konkret anugerah Tuhan dengan kepelbagaian yang nyaris tiada duanya, dengan kemajemukan suku, agama, kebudayaan dan wilayah. Oleh karena itu, memelihara "Bhinneka Tunggal Ika" di dalam kesatuan bangsa adalah tanggung jawab setiap komponen bangsa ini. Tepatlah bait seloka dalam madah Sutasoma karya Mpu Tantular yang menyatakan:

"*Bhineka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrwa*" yang berarti "Mengabdikan dan setia kepada prinsip berbeda-beda namun tetap satu jua sebagai suatu kebenaran yang tiada duanya". Inilah yang harus dijadikan modal demokrasi Indonesia.

Masih mampukah kita hidup dalam "Kepelbagaian namun dalam kesatuan dan kesatuan dalam kepelbagaian ini?".

Kesimpulan

Hal-hal tersebut di atas merupakan inti permasalahan konkret yang kita hadapi dalam berbangsa, selain faktor ekonomis, sosial dan kebudayaan, pendidikan yang ada dalam kategori sensitif dan tidak mudah ditangani. Meskipun Pancasila dan UUD 45 pasal 29, ayat 1 dan 2 memberikan jaminan kehidupan beragama kepada para pemeluk agama, namun kenyataan di lapangan acapkali "api jauh dari panggang". Demikian juga dalam Pemerintahan Orde Baru dulu dalam Repelita III hingga VI, agama mendapat tempat yang khusus dalam Keppres 7 Tahun 1979, terutama pada poin 2 bahwa "umat beragama menjadi "soko guru negara berdasar Pancasila" ternyata berdampak negatif.

Pada masa kini, dalam perjuangan penegakan demokrasi, supremasi hukum dan seperangkat agenda reformasi nyaris gagal. "Demokrasi" berubah menjadi anarki, sebagaimana sudah diingatkan sejak zaman Hellenisme oleh Aristoteles. Euforia (kesukaan pesta yang berlebihan) selama tiga tahun sesudah demokrasi terpasang selama 32 (tigapuluh dua)

⁶Perhatikan FKKS, *Beginilah Kemerdekaan Kita*, 203.

⁷Salah satu buku menarik untuk membicarakan Demokrasi adalah Samuel Huntington, *Demokrasi Gelombang Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1995) yang cukup berpengaruh terhadap pelengseran mantan Presiden Soeharto dengan kekuatan Orde Barunya pada tahun 1998.

tahun, harus segera diimbangi dengan menyusun skala prioritas membangun bangsa dan negara ini.

Pada dasarnya, semua aspek kehidupan manusia harus mengalami karya Kristus secara nyata. Merupakan tugas dan tanggung jawab orang Kristen untuk terus berperan aktif membantu pemerintah, agar dapat mewujudkan tugas hakikinya sebagai Hamba Allah.

Pemulihan kembali relasi manusia berdosa dengan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, harus juga dialami oleh Negara dan Pemerintah. Karena pada hari penghakiman eskatologis, pemerintah tidak akan luput dari permintaan tanggung jawab kepada Hakim Agung, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu, minimal gereja harus mendoakan pemerintah agar para pelaksananya diberi roh yang takut kepada Allah.

Pada saat ini, dengan agenda politik yang ada, yang kita kenal dalam alam reformasi, pendidikan politik dan sejumlah istilah lain, apakah merupakan jaminan "demokratisasi" terwujud di negeri ini? Tidak mengurangi makna demokrasi, kita memang perlu melihat apakah sistem budaya memang cocok untuk itu? Sebab kenyataannya, diberi kebebasan sedikit kita bukan menuju ke arah *demokrasi*, melainkan justru *anarki*.

Dengan demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa "Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung" dan Gereja-Gereja di Indonesia, merupakan bagian integral bangsa ini, mau tidak mau keterlibatannya, sumbang saran, partisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini harus nyata. Kepada setiap orang Kristen yang ada di tengah masyarakat, aktif di segala bidang kehidupan bangsa ini harus terus dimotivasi bahwa "Iman juga harus diimplementasikan dalam segala sektor kehidupan yang merupakan bagian integral berbangsa dan bernegara".

Penulis berharap bahwa dalam usianya, sewindu STTAA (Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung) sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan mandat Pemberitaan Injil, juga akan mewujudkan diri sebagai institusi gerejawi yang semakin konkret dalam memberikan kontribusinya dalam memotivasi Gereja untuk berpartisipasi konkret di tengah masyarakat, di segala bidang. Diharapkan tulisan ini memberikan stimulasi kepada Gereja dalam partisipasi, presentasi dan presensinya di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia.